

NILAI TUKAR PENDAPATAN RUMAH TANGGA PETANI AGROFORESTRI DI HUTAN KEMASYARAKATAN BINA WANA JAYA I KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG BATUTEKI KABUPATEN TANGGAMUS

(EXCHANGE HOUSEHOLD INCOME OF AGROFORESTRY FARMERS AT BINA WANA JAYA I COMMUNITY FOREST PROTECTION FOREST MANAGEMENT UNIT OF BATUTEKI TANGGAMUS DISTRICT)

Reni Yulian, Rudi Hilmanto, dan Susni Herwanti

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

E-mail: reniyulian@gmail.com

No. Telp: 085669968104

ABSTRAK

Kelompok Hutan kemasyarakatan (HKm) Bina Wana Jaya I merupakan salah satu HKm yang telah mendapatkan hak akses izin usaha pemanfaatan HKm yang dikelola dengan sistem agroforestri di KPHL Batuteki berdasarkan SK Menteri kehutanan dan SK Bupati sejak tahun 2009. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014, program HKm digerakkan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat gambaran kesejahteraan petani di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batuteki adalah konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan subsisten. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri di HKm Bina Wana Jaya I dan mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk NTPRP. Analisis data dilakukan berdasarkan konsep NTPRP dan dijelaskan secara deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kesejahteraan petani secara umum dapat dikategorikan sejahtera dengan NTPRP sebesar 1,07. Apabila NTPRP dikelompokkan berdasarkan pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang semakin luas, kelompok pengelolaan lahan sempit masih belum dikategorikan sejahtera. Faktor-faktor pembentuk NTPRP terdiri dari pendapatan yang berasal dari pertanian dan non-pertanian (usaha agroforestri, usaha non-agroforestri, buruh tani dan buruh non-pertanian) dan pengeluaran yang terdiri dari biaya produksi usaha agroforestri maupun usaha non-agroforestri dan biaya konsumsi.

Kata kunci: hutan kemasyarakatan (HKm), kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL), nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri (NTPRP)

ABSTRACT

Bina Wana Jaya I Community forest (HKm) group is one of HKm which has obtained a right access utilization permission managed using agroforestry systems in KPHL Batuteki based on the decree of forestry minister and the regent's decree since 2009. According to the the forestry minister regulation no. p.88/Menhut-II/2014, HKm program driven in order to increase the community welfare. One of the approach used to find out the community welfare is NTPRP concept based on subsistence requirement. The objectives of the research were to calculate the agroforestry farmers' NTPRP at Bina Wana Jaya I Community forest and identified NTPRP factors. The data analysis was done based on NTPRP concept and explained by quantitative descriptive. The result showed that generally, the farmer welfare was categorized as prosperous with NTPRP 1,07. If NTPRP was categorized based on management of land from narrow to wide, the narrow management of land were not in the

prosperous category. NTPRP factors framer consists of income from farming and non-farming (agroforestry, non-agroforestry, farming labourer and non-farming labourer) and expenditure consists of consumption and production cost.

Keywords : community forest (HKm), protection forest management unit (KPHL), exchange household income of agroforestry farmers (NTPRP)

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Kehutanan No.P.6/Menhut-II/2009, menjelaskan bahwa kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) merupakan salah satu pembagian KPH menurut fungsi pokok dan peruntukannya yang ditetapkan karena sebagian dan atau seluruhnya didominasi oleh kawasan lindung. Menurut Undang-undang N0.41 tahun 1999 pasal 1, KPHL memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege merupakan salah satu KPHL yang ada di Provinsi Lampung, dimana masyarakat di sekitar kawasan hutan yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) memanfaatkan kawasan hutan tersebut melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Kawasan hutan sangat penting bagi masyarakat di sekitar hutan untuk menunjang kelangsungan hidup masyarakat dari hasil hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan melalui IUPHKm di KPHL Batutege hingga saat ini terdapat 24 Gapoktan dan 10 diantaranya telah mendapatkan izin pengelolaan serta sisanya sedang dalam tahap fasilitasi pengajuan permohonan izin pengelolaan maupun dalam tahap diverifikasi Kementerian Kehutanan (RPHJP KPHL Batutege, 2014). Menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88.Menhut-II/2014, HKm merupakan hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat, dan upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Hutan Kemasyarakatan Bina Wana Jaya I telah mendapatkan izin usaha pemanfaatan HKm di KPHL Batutege berdasarkan SK Menhut No. 751/Menhut-II/2009 dan SK Bupati No. B.266/39/12/2009. Hutan kemasyarakatan tersebut selama ini dikelola dengan sistem agroforestri yang mengkombinasikan tanaman serbaguna atau MPTS. Sistem agroforestri merupakan sistem penggunaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu dengan tanaman tidak berkayu (kadang-kadang dengan hewan) yang tumbuh bersamaan atau bergiliran pada suatu lahan, untuk memperoleh berbagai produk dan jasa (*service*) sehingga terbentuk reaksi ekologis dan ekonomis antar komponen tanaman (Hairiah dkk; 2003). Hasil pemanfaatan kawasan hutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani HKm Bina Wana Jaya I. Gambaran kesejahteraan petani pada HKm Bina Wana Jaya I dapat dilihat dengan menggunakan penanda tingkat kesejahteraan petani yaitu konsep Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani (Sugiarto, 2008) yang merupakan ukuran kemampuan rumah tangga petani di dalam memenuhi kebutuhan subsistennya. Konsep NTPRP tersebut dikembangkan dari konsep Nilai Tukar Subsisten (NTS). Nilai tukar pendapatan yang menggunakan konsep NTS sudah memasukkan semua usaha pertanian, tetapi belum memasukkan berburuh tani dan sektor non-pertanian (Supriyati, 2005). Sementara itu pemasukan pendapatan petani juga dibantu dari luar sektor pertanian. Sehingga muncul konsep NTPRP yang di dalamnya memasukkan hasil pertanian, buruh tani, hasil non-pertanian dan buruh non-pertanian. Konsep NTPRP selama ini diterapkan pada bidang pertanian agroekosistem. Petani biasanya mengelola lahannya sendiri ataupun menggarap lahan orang lain dengan sistem bagi hasil untuk memperoleh manfaat atau pendapatan.

Namun pada kenyataannya terdapat petani yang tidak hanya mengelola lahan pada pertanian agroekosistem untuk memperoleh manfaat atau pendapatan. Salah satunya yaitu petani disekitar hutan, yang tidak memiliki lahan sendiri sehingga petani tersebut memanfaatkan kawasan hutan untuk memperoleh pendapatan bagi kelangsungan hidupnya.

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini konsep NTPRP diterapkan pada petani di sekitar lahan kawasan hutan dan belum pernah dilakukan pada tingkat petani dengan menggunakan sistem agroforestri di HKm. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani yang dapat melihat gambaran kesejahteraan petani berdasarkan pemenuhan kebutuhan subsistennya dan mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk NTPRP di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutegi Kabupaten Tanggamus.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di HKm Bina Wana Jaya I Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Kabupaten Tanggamus pada bulan Maret 2015. Objek dalam penelitian ini adalah petani HKm Bina Wana Jaya I. Alat yang digunakan pada penelitian adalah kamera, alat tulis kantor, laptop, dan kuisioner. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner langsung kepada responden yang meliputi pendapatan dari bidang pertanian (jenis komoditi, kuantitas produksi, harga jual komoditi agroforestri dan berburuh tani) dan bidang non-pertanian (pendapatan dari usaha non-agroforestri, berburuh non-pertanian) serta pengeluaran (pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi dan biaya produksi). Data sekunder berupa keadaan umum lokasi penelitian diperoleh melalui studi pustaka dari Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan kantor KPHL Batutegi, jurnal, dan terbitan lainnya untuk melengkapi data primer.

Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode *random sampling*. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 414 orang (RPHJP KPHL Batutegi, 2014), dengan menggunakan formula slovin dalam Arikunto (2011) diperoleh responden sebanyak 40 orang.

$$n = \frac{N}{N e^2 + 1}$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- e = Batas error 15%
- 1 = Bilangan konstan

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan konsep NTPRP dan analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif serta disajikan dalam bentuk tabel.

1. Pengelompokkan pengelolaan lahan

Pengelompokkan pengelolaan lahan masing-masing didefinisikan sebagai berikut (Adnyana, dkk, 2000 dalam Adnyana dan Suhaeti, 2003):

- a. Pengelolaan lahan sempit: luas lahan $\mu - 0.50 \text{ sd}$
- b. Pengelolaan lahan sedang : $\mu - 0.50 \text{ sd} < \text{luas lahan} < \mu + 0.50 \text{ sd}$
- c. Pengelolaan lahan luas : luas lahan $> \mu + 0.50 \text{ sd}$

Keterangan:

- μ : rata-rata luas lahan
- sd : standar deviasi pengelolaan lahan

2. Perhitungan Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani

Nilai Tukar Pendapatan Rumah tangga Petani (NTPRP) dihitung dengan rumus (Sugiarto, 2008):

$$\begin{aligned} \text{NTPRP} &= \frac{Y}{E} \\ Y &= Y_p + Y_{np} \\ E &= E_p + E_{np} \end{aligned}$$

Penelitian ini dilakukan pada lingkup hutan kemasyarakatan yang dikelola dengan sistem agroforestri dan menambahkan total pengeluaran untuk konsumsi pada perhitungan yang merujuk pada penelitian Supriati (2005) dan Sugiarto (2008), untuk memperjelas rumus tersebut, maka:

$$\begin{aligned} \text{NTPRP} &= \frac{Y}{E} \\ Y &= Y_p + Y_{np} \\ E &= E_p + E_{np} + Z \end{aligned}$$

Keterangan :

- NTPRP = Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani agroforestri
- Y = Pendapatan rumah tangga petani agroforestri (Rp)
- E = Pengeluaran rumah tangga petani agroforestri (Rp)
- Y_p = Total pendapatan dari usaha tani agroforestri (Rp)
- Y_{np} = Total pendapatan dari usaha non-agroforestri (Rp)
- E_p = Total pengeluaran untuk usaha tani agroforestri (Rp)
- E_{np} = Total pengeluaran untuk usaha non-agroforestri (Rp)
- Z = Total pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga (Rp)

Zebua (2010) dalam Sundari, Zulfanita dan Utami (2012), menyebutkan bahwa nilai tukar pendapatan rumah tangga petani (NTPRP) yang digunakan sebagai tolak ukur kesejahteraan rumah tangga petani yaitu:

1. NTPRP < 1, artinya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga petani belum masuk kategori sejahtera.
2. NTPRP > 1, artinya bahwa tingkat kesejahteraan rumah tangga petani dikategorikan sejahtera.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Lahan dan Identifikasi Jenis Tanaman

Pengelolaan lahan petani agroforestri dibagi menjadi 3 kategori kelompok pengelolaan lahan, yaitu kelompok pengelolaan lahan sempit, sedang, dan luas. Pembagian kelompok pengelolaan lahan disajikan pada tabel 3:

Tabel 3. Sebaran Kelompok Pengelolaan Lahan Responden.

Kelompok Pengelolaan Lahan (Ha)	Range	Responden	Persentase (%)	Rata-rata luas lahan (Ha)	Total luas lahan (Ha)
Sempit	1,4	10	25	0,95	9,50
Sedang	1,5-3,2	26	65	2,13	55,50
Luas	>3,2	4	10	6,50	26,00
Total		40	100	9,58	91
Rata-Rata					2,28

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Tabel 3, menunjukkan bahwa pengelolaan lahan didominasi oleh pengelolaan lahan sedang yaitu sebesar 65% dari total responden dengan rata-rata luas lahan sebesar 2,13 Ha, kemudian diikuti pengelolaan lahan sempit (25%) dengan rata-rata luas lahan sebesar 0,95 Ha, dan pengelolaan lahan luas sebesar 10% dengan rata-rata luas lahan sebesar 6,50 Ha. Lahan yang dikelola oleh petani di HKM Bina Wana Jaya I selama ini dikelola dengan sistem

agroforestri yang mengkombinasikan berbagai jenis tanaman. Jenis-jenis tanaman yang ada di HKm Bina Wana Jaya I disajikan pada tabel 4:

Tabel 4. Identifikasi Jenis Tanaman di HKm Bina Wana Jaya I KPH Lindung Batutegei.

Jenis Tanaman	Nama Ilmiah	Jenis Tanaman	Nama Ilmiah
Alpukat	<i>Persea Americana</i>	Kluwih	<i>Artocarpus camansi</i>
Cempaka	<i>Magnolia champaca</i>	Lada	<i>Piper nigrum</i>
Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>	Mahoni	<i>Swietenia macrophylla</i>
Duren	<i>Durio zibethinus</i>	Medang	<i>Cinnamomum spp</i>
Jaling	<i>Archidendron microcapum</i>	Nangka	<i>Artocarpus heterophyllus</i>
Jengkol	<i>Archidendron pauciflorum</i>	Pala	<i>Myristica fragrans</i>
Jeruk	<i>Citrus sp</i>	Petai	<i>Parkia speciosa</i>
Kakao	<i>Theobroma cacao</i>	Pinang	<i>Areca catechu</i>
Kapuk	<i>Ceiba pentandra</i>	Pulai	<i>Alstonia scholaris</i>
Karet	<i>Hevea brasiliensis</i>	Sukun	<i>Artocarpus altilis</i>
Kemiri	<i>Aleurites molluccana</i>	Sonokeling	<i>Dalbergia latifolia</i>
Kopi	<i>Coffea sp</i>		

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa terdapat 23 jenis tanaman yang terdiri dari 20 jenis tanaman *multi purpose trees species* (MPTS) dan 4 jenis tanaman berkayu. Dari hasil identifikasi jenis-jenis tanaman tersebut, hanya terdapat 4 jenis tanaman dari 20 jenis tanaman MPTS yang telah memberikan sumbangan pendapatan yaitu kopi, karet, alpukat, dan lada. Jenis tanaman yang lain, belum memberikan pendapatan karena belum berbuah dan ada sebagian yang baru ditanam, selain itu juga ada tanaman yang tidak diambil buahnya, sehingga siapapun yang ingin mengambilnya diperbolehkan.

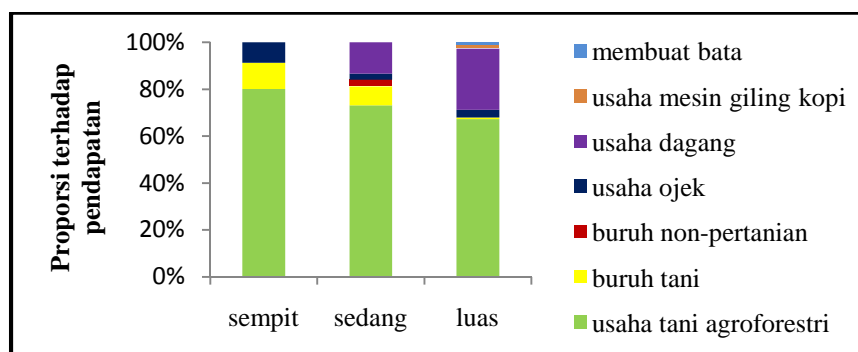
B. Struktur Pendapatan Rumah Tangga Petani Agroforestri

Pendapatan rumah tangga petani dapat mencerminkan keadaan ekonomi rumah tangga. Tinggi rendahnya tingkat pendapatan rumah tangga petani dapat memperlihatkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga (Khususiyah dkk; 2010). Secara agregat pendapatan rumah tangga petani agroforestri di HKm diperoleh dari dua sumber pendapatan, yaitu sumber pendapatan dari pertanian dan non-pertanian. Sumber pendapatan pertanian terdiri dari usaha tani agroforestri yang merupakan sumber pendapatan pokok dan berburuh tani, sedangkan sumber pendapatan dari non-pertanian terdiri dari buruh non-pertanian, usaha ojek, dagang usaha mesin giling kopi, dan usaha membuat batu bata.

Pendapatan dari sektor pertanian dengan sistem agroforestri pada lahan kawasan sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga masyarakat. Proporsi pendapatan dari lahan kawasan pada masing-masing kelompok pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang semakin luas dapat dilihat pada Gambar 3.

Proporsi pendapatan dari lahan kawasan pada kelompok pengelolaan lahan sempit mencapai 80,01% dari total pendapatan, sedangkan pada kelompok pengelolaan lahan sedang mencapai 73,07% dan kelompok pengelolaan lahan luas mencapai 67,30% dari total pendapatan. Perbedaan proporsi pendapatan dari lahan kawasan tersebut disebabkan karena sumbangan proporsi pendapatan dari hasil usaha lain yang berbeda pada masing-masing kelompok pengelolaan lahan. Petani pengelolaan lahan sempit lebih fokus pada usaha tani agroforestrinya dibandingkan usaha lainnya sehingga proporsi pendapatan usaha lainnya hanya sebesar 19,99%, berbeda dengan petani pengelolaan lahan sedang dan luas yang juga memperhatikan usaha lainnya sehingga proporsi pendapatan dari usaha lainnya cukup besar dibandingkan petani pengelolaan lahan sempit yaitu sebesar 26,93% dan 32,70%. Hal ini seperti penelitian Khususiyah, dkk (2010) pada kawasan hutan Sesaot, Provinsi NTB bahwa

proporsi pendapatan pada lahan kawasan berkisar antara 33% - 59% dibandingkan proporsi pendapatan dari luar kawasan atau pada lahan pribadi sebesar 38%. Peran dari sektor pertanian masih merupakan sumber pendapatan utama bagi petani disekitar kawasan hutan dalam meningkatkan taraf hidupnya.



Gambar 3. Sumber pendapatan petani HKm

Tabel 5, menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan hasil pertanian masing-masing kelompok pengelolaan lahan berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan luas pengelolaan lahan antar petani HKm. Kontribusi pendapatan dari pertanian didominasi dari hasil usaha tani agroforestri yaitu sebesar 72,13%. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Sugiarto, 2008) bahwa rendahnya sumber pendapatan pertanian pada kelompok pengelolaan lahan yang sempit sebagai akibat kecilnya pengelolaan lahan yang digarap karena ketimpangan distribusi pengelolaan lahan.

Tabel 5. Struktur Pendapatan Petani Agroforestri berdasarkan Pengelolaan Lahan di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutegei dalam Satu Tahun

Sumber Pendapatan	Kelompok Pengelolaan Lahan						Total	
	Sempit		Sedang		Luas		(Rp.000)	(%)
	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)		
I. Pertanian								
1. Usaha tani agroforestri	112.290	80,01	523.402	73,07	248.050	67,30	883.742	72,13
2. Buruh tani	15.750	11,22	58.415	8,15	2.540	0,69	76.705	6,26
Total	128.040	91,24	581.817	81,22	250.590	67,99	960.447	78,39
Rata-rata	12.804		22.377,58		6.2647,5		24.011,18	
II. Non-Pertanian								
1. Buruh non-pertanian	0	0	20.500	2,86	0	0	20.500	1,67
2. Usaha ojek	12.300	8,76	18.000	2,51	12.000	3,26	42.300	3,45
3. Usaha dagang	0	0	96.000	13,40	96.000	26,05	192.000	15,67
4. Usaha mesin giling kopi	0	0	0	0	5.000	1,36	5.000	0,41
5. Membuat bata	0	0	0	0	5.000	1,36	5.000	0,41
Total	12.300	8,76	134.500	18,78	118.000	32,01	264.800	21,61
Rata-rata	1.230		5.173,08		29.500		6.620	
Total	140.340	100	716.317	100	368.590	100	122.5247	100
Rata-rata	14.034		27.550,65		92.147,5		30.631,18	

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Rata-rata pendapatan dari non-pertanian pada masing-masing kelompok pengelolaan lahan juga berbeda-beda. Perbedaan rata-rata pendapatan pada kelompok pengelolaan lahan sempit dan sedang yang lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pengelolaan lahan luas disebabkan karena kurangnya modal untuk melakukan usaha non-pertanian. Hal tersebut juga ditunjang dengan adanya kontribusi pendapatan non-pertanian lebih besar dihasilkan dari usaha dagang yaitu sebesar 15,67%.

Kontribusi pendapatan petani dari pertanian khususnya usaha tani agroforestri sebesar 72,13% pada umumnya merupakan hasil dari penerimaan tanaman kopi. Sedangkan kontribusi terbesar pendapatan non-pertanian dari usaha dagang sebesar 15,67%, lalu diikuti usaha ojek sebesar 3,45%, buruh non-pertanian sebesar 1,67% dan lainnya. Pemanenan tanaman kopi hanya dilakukan satu kali dalam satu tahun yang menyebabkan kontribusi terbesar pendapatan petani hanya diperoleh satu kali dalam satu tahun. Sedangkan biaya untuk kebutuhan hidup harus dikeluarkan setiap hari, sehingga rumah tangga petani membutuhkan pendapatan lain. Kontribusi pendapatan lain rumah tangga petani bersal dari non-pertanian, hal ini dipilih karena hasil yang diperoleh terus berjalan dari waktu ke waktu dibandingkan hasil pertanian yang membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu hasil panen. Seperti penjelasan Fudjaja dan Fitri (2011), bahwa disektor pertanian terdapat *gestation period* atau jarak waktu (*gap*) antara pengeluaran dan penerimaan pendapatan, sehingga keuntungan dari hasil pertanian membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh. Selain itu menurut Mubyarto (1995) dalam Fudjaja dan Fitri (2011), menjelaskan bahwa *gestation period* dalam bidang pertanian jauh lebih panjang dari pada bidang industri. Dalam bidang industri, sekali produksi telah berjalan, maka penerimaan dari penjualan akan mengalir setiap hari sebagaimana mengalirnya hasil produksi. Seperti kontribusi dari usaha dagang yang setiap minggunya akan menghasilkan keuntungan dari modal yang dikeluarkan maupun usaha ojek yang dilakukan pada saat waktu-waktu tertentu ketika petani tidak terlalu sibuk yang dapat membantu pemasukan petani.

C. Pola Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Petani Agroforestri

Secara umum besaran pengeluaran konsumsi rumah tangga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran konsumsi untuk makanan dan non-makanan. Dari tabel 6, tingkat pengeluaran konsumsi pada kedua kelompok untuk masing-masing rumah tangga pada pengelolaan lahan tersebut berbeda. Untuk proporsi pengeluaran kelompok makanan rumah tangga pada pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang luas cenderung menurun. Perbedaan proporsi pengeluaran makanan tersebut disebabkan oleh besarnya tingkat pendapatan pada masing-masing kelompok yang berbeda-beda, seperti pada Tabel 5, rata-rata pendapatan petani pada kelompok pengelolaan lahan sempit dan sedang lebih kecil dibandingkan kelompok pengelolaan lahan luas sehingga dapat menyebabkan perbedaan proporsi pengeluaran rumah tangga petani itu sendiri. Hal ini didukung oleh pernyataan Sugiarto (2008), fenomena tersebut akan terjadi apabila pendapatan rendah akan lebih mengutamakan untuk kebutuhan subsistennya. Berbeda halnya bila pendapatan yang diperoleh semakin tinggi akan terjadi pergeseran antara kebutuhan makanan dengan kebutuhan bukan makanan.

Selanjutnya, pengeluaran untuk non-makanan terdiri dari enam kelompok jenis pengeluaran diantaranya adalah transportasi dan telekomunikasi, rokok, pendidikan, kesehatan, sandang, dan lainnya. Diantara enam kelompok pengeluaran konsumsi non-makanan, pengeluaran untuk transportasi dan telekomunikasi lebih tinggi dibanding pengeluaran non-makanan lainnya. Hal ini karena letak lokasi lahan yang dikelola cukup jauh dari talang atau tempat tinggal di dalam kawasan maupun lokasi tempat tinggal warga. Kemudian diikuti pengeluaran untuk konsumsi rokok. Besarnya pengeluaran konsumsi rokok disebabkan karena sebagian besar atau 80% dari total responden merupakan pengkonsumsi

rokok, sehingga konsumsi rokok juga mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Disamping itu, pengeluaran non-makanan seperti pendidikan, sandang, kesehatan dan lainnya (perbaikan rumah, olahraga, dan rekreasi) berperan juga sebagai pelengkap kebutuhan non-makanan yang penting bagi rumah tangga.

Tabel 6. Proporsi Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Petani Agroforestri dalam Satu Tahun.

Jenis Konsumsi	Kelompok Pengelolaan Lahan						Total	
	Sempit		Sedang		Luas		(Rp.000)	(%)
	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)	(Rp.000)	(%)		
I. Makanan	129.600	64,28	257.480	45,62	46.400	38,92	433.480	48,97
II. Non-Makanan								
1. Transportasi dan Telekomunikasi	37.450	18,58	150.720	26,71	23.920	20,06	212.090	23,96
2. Pendidikan	1.300	0,64	49.150	8,71	6.000	5,03	56.450	6,38
3. Rokok	21.984	10,90	65.424	11,59	12.048	10,11	99.456	11,24
4. Sandang	7.500	3,72	19.150	3,39	2.600	2,18	29.250	3,30
5. Kesehatan	2.120	1,05	17.792	3,15	27.060	22,70	46.972	5,31
6. Lainnya	1.660	0,82	4.640	0,82	1.200	1,01	7.500	0,85
Total non-makanan	72.014	35,72	306.876	54,38	72.828	61,08	451.718	51,03
Total	201.614	100	564.356	100	119.228	100	885.198	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Pada Tabel 6, secara agregat memperlihatkan bahwa total pengeluaran rumah tangga antar kebutuhan makanan dan non-makanan relatif merata dengan porsi hampir seimbang dari total pengeluaran rumah tangga. Hal ini berarti bahwa rumah tangga petani agroforestri sudah berorientasi menyeimbangkan kebutuhan untuk makanan dan non-makanan sesuai dengan tingkat pendapatan yang mereka peroleh.

Sementara itu rumah tangga petani agroforestri yang dikelompokkan menurut pengelolaan lahan, ada kecenderungan bahwa pada kelompok pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang luas proporsi pengeluaran terhadap konsumsi makanan cenderung menurun, dan sebaliknya pada kelompok pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang luas proporsi pengeluaran terhadap konsumsi non-makanan semakin tinggi. Sedangkan untuk pengeluaran konsumsi pada kelompok pengelolaan lahan dari yang luas ke yang sempit, proporsi pengeluaran terhadap konsumsi makanan semakin besar dan sebaliknya pada jenis konsumsi non-makanan semakin kecil. Hal tersebut karena tingkat pendapatan yang berbeda pada masing-masing rumah tangga akan mengakibatkan terjadinya pemilihan kebutuhan yang dianggap paling penting dan didahulukan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sukirno (2002) dalam Persaulian, Aimon, dan anis (2013), bahwa pada hakikatnya kegiatan untuk membuat pilihan dapat dilihat dari dua segi yaitu segi penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki dan dari segi mengkonsumsi barang-barang yang dihasilkan. Individu harus memikirkan cara terbaik dalam menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan yang diterima dari penggunaan sumber-sumber daya tersebut, dan individu akan menentukan jenis dan jumlah barang yang akan dibeli.

D. Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Agroforestri

Salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga petani agroforestri di HKm dapat didekati dengan konsep nilai tukar pendapatan rumah tangga

(NTPRP). Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani yang diperoleh merupakan nisbah antara pendapatan total rumah tangga dari berbagai sumber pendapatan dengan seluruh pengeluaran petani yang terdiri dari konsumsi dan biaya produksi.

Tabel 7 menunjukkan bahwa besarnya NTPRP yang diperoleh dari masing-masing kelompok pengelolaan lahan terhadap total pengeluaran bervariasi. Nilai tukar pendapatan rumah tangga pada kelompok pengelolaan lahan sempit terhadap total pengeluaran <1 (NTPRP = 0,61), sedangkan NTPRP pada kelompok pengelolaan lahan sedang dan luas terhadap total pengeluaran >1 (NTPRP = 1,04 dan 1,62). Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga petani pada kelompok pengelolaan lahan sempit belum masuk kategori sejahtera untuk memenuhi kebutuhan subsistennya dengan baik. Indikasi ini karena total pengeluaran yang terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi dan biaya produksi yang dikeluarkan rumah tangga lebih besar dari pendapatan. Sedangkan pada kelompok pengelolaan sedang dan luas, besarnya pendapatan yang diperoleh masih mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan pengeluaran.

Tabel 7. Nilai tukar pendapatan rumah tangga petani menurut kelompok Pengelolaan lahan pada HKm Bina wana Jaya I KPHL Batutegei.

Uraian	Kelompok Pengelolaan Lahan			Total
	Sempit	Sedang	Luas	
A. PENDAPATAN (Rp.000/tahun)	140.340	716.317	368590	1.225.247
I. Pendapatan Pertanian				
1. Usaha tani agroforestri	112.290	523.402	248050	883.742
2. Buruh tani	15.750	58.415	2540	76.705
II. Pendapatan Non-Pertanian				
1. Usaha non- agroforestri	12.300	114.000	118000	244.300
2. Buruh non-pertanian	0	20.500	0	20.500
B. BIAYA PRODUKSI (Rp.000/tahun)	26.862,5	123.267,5	108960	259.090
1. Usaha tani agroforestri	22.662,5	44.667,5	29090	96.420
2. Usaha non-agroforestri	4.200	78.600	79870	162.670
C. KONSUMSI (Rp.000/tahun)	201.614	564.356	119228	885.198
1. Makanan	129.600	257.480	46400	433.480
2. Non-makanan	72.014	306.876	72828	451.718
D. TOTAL PENGELUARAN (B+C) (Rp.000/tahun)	228.476,5	687.623,5	228188	1.144.288
E. NILAI TUKAR PENDAPATAN				
1. Terhadap total pengeluaran	0,61	1,04	1,62	1,07
2. Terhadap biaya produksi	5,22	5,81	3,38	4,73
3. Terhadap konsumsi makanan	1,08	2,78	7,94	2,83
4. Terhadap konsumsi non-makanan	1,95	2,33	5,06	2,71
5. Terhadap total konsumsi	0,70	1,27	3,09	1,38

Sumber: Data Primer Diolah, 2015

Sementara itu, bila dibandingkan antara NTPRP terhadap total konsumsi dan terhadap biaya produksi dari masing-masing kelompok pengelolaan lahan dari yang sempit ke yang semakin luas, menunjukkan bahwa NTPRP terhadap biaya produksi (NTPRP = 5,22; 5,81; dan 3,38) lebih besar dibanding NTPRP terhadap total konsumsi (NTPRP = 0,70; 1,27; dan 3,09). Data tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga petani lebih banyak mengeluarkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dibandingkan kebutuhan usaha. Hal ini

dikarenakan kebutuhan konsumsi harus dipenuhi setiap hari baik konsumsi makanan maupun non-makanan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan usahanya petani tidak harus mengeluarkan biaya produksi setiap hari, seperti pada usaha agroforestri pembelian obat dan pupuk hanya dilakukan satu sampai dua kali dalam satu tahun, begitupun untuk usaha non-agroforestri. Namun demikian, NTPRP terhadap biaya produksi pada kelompok pengelolaan lahan luas lebih kecil (3,38) dibandingkan pengelolaan lahan sedang (5,81). Hal ini mengindikasikan bahwa petani pengelolaan lahan luas lebih banyak mengeluarkan pendapatannya untuk biaya produksi seperti membeli bibit cengkeh maupun karet, pupuk dan obat-obatan untuk mengelola lahannya sehingga dapat memberikan pendapatan yang optimal. Sedangkan NTPRP terhadap total konsumsi pada kelompok pengelolaan lahan sempit lebih kecil (NTPRP = 0,70) dibanding dengan yang lainnya, artinya bahwa besarnya pendapatan yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi (makanan dan non-makanan), untuk menutupi kekurangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi tersebut, petani biasanya meminjam uang terlebih dahulu pada tengkulak atau yang lainnya kemudian akan dibayar pada saat panen. Oleh karena itu kelompok pengelolaan lahan sempit membutuhkan pendapatan lain sebagai pendapatan tambahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nilai Tukar Pendapatan Rumah Tangga Petani Agroforestri di HKm Bina Wana Jaya I KPHL Batutege pada kelompok pengelolaan lahan sempit sebesar 0,61 dan dikategorikan belum sejahtera; sedangkan kelompok pengelolaan lahan sedang dan luas dengan NTPRP sebesar 1,04 dan 1,62 dikategorikan sejahtera.
2. Faktor-faktor pembentuk NTPRP terdiri dari pendapatan yang berasal dari pertanian dan non-pertanian (usaha agroforestri, usaha non-agroforestri, buruh tani dan buruh non-pertanian) dan pengeluaran yang terdiri dari biaya produksi usaha agroforestri maupun usaha non-agroforestri serta biaya konsumsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, M. O. dan R. N. Suhaeti. 2003. *Penerapan Indeks Gini untuk Mengidentifikasi Tingkat Pemerataan Pendapatan dan Pengeluaran Rumah Tangga Pedesaan di Wilayah Jawa dan Bali*. Diakses pada tanggal 17 April 2015. <http://ojs.unud.ac.id/index.php/soca/article/download/4023/3012>.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta. 110p.
- Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. 2014. *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutege 2014-2023*. Lampung.
- Fudjaja, L dan Fitri. 2011. *Analisis dampak BLM-PNPM MP 2008 terhadap sumber-sumber pendapatan wanita tani*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 8(1): 29p.
- Kementerian Kehutanan. 2014. *Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2009. *Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan*. Jakarta.
- Hairiah, K., M. A. Sardjono, dan S. Sabarnurdin. 2003. *Bahan Ajaran Agroforestri 1: Pengantar Agroforestri*. Buku. World Agroforestry Centre (ICRAF). Bogor. 2p.
- Khususiyah, N., Y. Buana dan Suyanto. 2010. *Hutan kemasyarakatan (HKm) : upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan petani miskin di sekitar hutan*. Brief no.06 Policy Analysis Unit. World Agroforestry centre (ICRAF). Bogor. 3p.

- Persaulian, B., H. Aimon, A. Anis. 2013. *Analisis konsumsi masyarakat di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi, 1(2): 16p.
- Sugiarto. 2008. *Analisis Pendapatan, Pola konsumsi dan kesejahteraan petani padi pada basis agroekosistem lahan sawah irigasi di pedesaan*. Seminar Nasional Dinamika Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan: Tantangan Dan Peluang Bagi Peningkatan Kesejahteraan Petani (19 November 2008). Pusat Analisis Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Departemen Pertanian. Bogor. 1—14p.
- Sundari, H. A., Zulfanita dan D. P. Utami. 2012. *Kontribusi usahatani ubi jalar (Ipomoea batatas L.) terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Ukirsari Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Surya Agritama 1(2): 34—45p.
- Supriyati. 2005. *Analisis nilai tukar pendapatan rumah tangga petani (kasus di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi Dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Icaseps Working Paper No 71. 1—17p.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Halaman ini sengaja dikosongkan